

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah harus mengupayakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah untuk mencapai tata kelola yang baik. Pengendalian pelaporan keuangan daerah pengatur semua aspek teknis regulasi, kelembagaan dan sistem informasi keuangan daerah untuk meningkatkan kelebihan sumber daya manusia.

Dengan berpegang pada prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan dan identitas lokal, pengelolaan pemerintahan daerah tidak hanya meningkatkan daya saing lokal, tetapi juga meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat serta berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan bersama. dimaksudkan untuk mempercepat Wilayah dalam sistem NKRI. Sistem manajemen pemerintahan negara yang perlu lebih memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, hubungan antar daerah, potensi dan keragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan internasional dalam satu negara, dan peningkatan manajemen

Pemerintah negara bagian, berdasarkan sistem dan prinsip Republik Persatuan, menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pembantuannya, dengan menggunakan prinsip otonomi antara pemerintah negara bagian dan perwakilan penduduk setempat. Pemimpin daerah sebagai unsur bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah sebagai unsur pengelola pemerintah daerah yang mengarahkan perwujudan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan posisi keuangan dan hasil operasi instansi pemerintah pada suatu titik waktu atau periode tertentu. Jenis laporan keuangan yang umum dikenal adalah laporan operasi, neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan modal. Dalam mengelola suatu instansi, laporan keuangan sangat penting pada akhir bulan dan akhir tahun. Tujuannya tak lain untuk mengecek keadaan agensi apakah selama ini untung atau justru merugi. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi untuk laporan posisi keuangan lembaga dan dapat digunakan sebagai dokumen.

Salah satu cara yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah secara tepat waktu. Laporan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum sesuai dengan prinsip. Standar ini diperlukan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Laporan keuangan bertujuan umum dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan entitas pelapor dan membantu pengguna membuat keputusan tentang posisi keuangannya,

realisasi anggaran, arus kas, dan alokasi sumber daya. Jika informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Perpres No. 71/2010, maka informasi tersebut berguna untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Ini berarti produsen dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas.

Informasi dimasukkan dalam penyusunan laporan keuangan karena pemerintah daerah diwajibkan untuk mematuhi standar nilai informasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan hilangnya wilayah, potensi kekurangan wilayah, kurangnya pendapatan, manajemen yang buruk, inefisiensi, inefisiensi, inefisiensi. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat seberapa baik pelaksanaan pengelolaan keuangan yang telah dilakukan dan digunakan oleh para pengelola untuk mengambil keputusan. Informasi keuangan harus berkualitas tinggi karena tidak mengandung informasi palsu yang mengarah pada keputusan yang salah. Derajat kualitas adalah gelar yang memenuhi karakteristik kualitatif suatu gelar. Semua bisnis, termasuk kotamadya, diharuskan menyiapkan akun tahunan.

Laporan Keuangan Daerah (LKPD) memberikan gambaran tentang situasi dan kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya (LKPI) merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat (APBD). Selanjutnya, Pasal 32 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Pemerintah mengatur bahwa bentuk dan isi laporan keuangan dalam rangka

pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SAP berbasis periode menghasilkan laporan keuangan yang memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya bagi pemangku kepentingan (baik pengguna akuntansi pemerintah maupun auditor). Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip akuntansi bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Laporan keuangan kota sendiri merupakan gambaran dari posisi keuangan dan kinerja instansi tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kepentingan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah karena mengalihkan dana ke pemerintah daerah selama pelaksanaan otonomi daerah.

Bakat adalah suatu keharusan sebagai lembaga pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan mereka. Kehadiran personel yang berkualitas membantu meminimalkan kesalahan dalam pelaporan keuangan. Penelitian Gumelar (2019), Nugroho (2019) dan Ramadhan (2018) menunjukkan bahwa keterampilan masyarakat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah.

Pengendalian internal meliputi kebijakan, proses dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang lebih baik berarti kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik (Tuanakotta 2014). Penelitian Osti

(2015) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Nugroho (2018) dan Pasha (2018).

Selain fungsi teknologi informasi (hardware dan software) guna mengolah serta menyimpan informasi juga memiliki fungsi teknologi komunikasi guna mengirim dan menerima informasi. Semakin bagus teknologi informasi yang digunakan maka semakin bagus pula kualitas pelaporannya. Studi Baharsyah (2019) dan Nugroho (2018) mempengaruhi kualitas informasi keuangan.

Penelitian ini adalah pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang dibuat oleh Osti (2015), “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah” (Studi Empiris OPD Kota Medan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Osti (2015) adalah bahwa variabel dan ukuran variabel dalam penelitian ini meliputi tiga variabel bebasnya yaitu kinerja karyawan (X1), sistem pengendalian intern X2 Terdapat 4 variabel. satu variabel (Y) terkait penggunaan teknologi informasi (X3) dan kualitas pelaporan keuangan, sedangkan survei Osti (2015) hanya memiliki tiga variabel, yaitu dua variabel independen Standar Akuntansi Pemerintahan dan Salah satu variabel dependen penerapan sistem pengendalian intern adalah kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana deskripsi kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi mereka yang dapat melakukan penelitian di masa depan dan berkontribusi pada pengembangan teori.

b. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggambarkan apa saja yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan OPD sehingga kesalahan di kemudian hari dapat diperbaiki.

c. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk praktek akuntansi sektor publik untuk masa depan Indonesia, khususnya kota Malang, tidak hanya akan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah tentang aspek-aspek pengelolaan kualitas keuangan yang efektif, tetapi juga meningkatkan kinerja lembaga lokal dan sektor publik. dapat memenuhi harapan masyarakat atas pelayanan yang mereka terima.